

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,
RESPONSIVINESS PENGELOLAAN DANA TERHADAP
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
DI DESA BOJONG KULON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :
Moh Abdul Azis
NIM. 210121085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

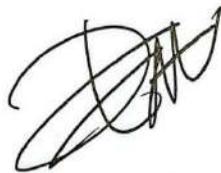
PENGARUH PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,
RESPONSIVINESS PENGELOLAAN DANA TERHADAP TINGKAT
KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA BOJONG KULON

Moh. Abdul Azis

NIM. 210121085

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing I



Itat Tatmimah, S.E., M.Si.

NIDN. 0402067401

Pembimbing II



Muzavvanah, M.Pd.

NIDN. 2119068803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Asep Gunawan, M.Si., CHRA

NIDN. 0008086601

Ketua Program Studi Akuntansi



M. Taqib Azis, S.E., M.Si., Akt., CA

NIDN. 0420066901

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, RESPONSIVINESS PENGELOLAAN DANA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA BOJONG KULON

Moh. Abdul Azis

NIM. 210121085

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal: 30 Agustus 2025

1. Itat Tatmimah, SE., M.Si
NIDN. 0402067401
Pembimbing I
2. Muzayyanah, M.Pd
NIDN. 2119068803
Pembimbing II
3. M. Taufik Azis, S.E., M.Si., Akt., CA
NIDN. 0420066901
Penguji I
4. Budiarto, S.E., M.Ak., Ak., CA
Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Asep Gunawan, M.Si., CHRA
NIDN. 0008086601



M. Taufik Azis, S.E., M.Si., Akt., CA
NIDN. 0420066901

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Moh. Abdul Azis
NIM : 210121085
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Januari 2003
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi,
Responsiviness Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat
Kepercayaan Masyarakat Di Desa Bojong Kulon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya dan bukan tiruan, salinan atau duplikat dari skripsi yang telah digunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan tiruan, salinan atau duplikat maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Cirebon, 30 Agustus 2025
Penulis

MOH. ABDUL AZIS
NIM. 2101210285

MOH. ABDUL AZIS

NIM. 2101210285

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, *RESPONSIVINESS*

PENGELOLAAN DANA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN

MASYARAKAT

DI DESA BOJONG KULON

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden yang merupakan kepala keluarga di desa tersebut. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas justru berpengaruh negatif signifikan. Responsivitas merupakan variabel yang paling dominan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang tidak disertai keterlibatan dan komunikasi yang terbuka dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa perlu didukung oleh transparansi informasi dan responsivitas yang tinggi dari aparat desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas pengelolaan Dana Desa, Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

MOH. ABDUL AZIS

NIM. 2101210285

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, *RESPONSIVINESS*

PENGELOLAAN DANA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN

MASYARAKAT

DI DESA BOJONG KULON

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, and responsiveness in the management of village funds on the level of public trust in Bojong Kulon Village. The research employed a descriptive quantitative method with a survey approach using questionnaires distributed to 100 respondents who are heads of households in the village. The data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that transparency and responsiveness have a positive and significant effect on public trust, while accountability has a significant negative effect. Responsiveness is identified as the most dominant variable in building public trust. The implications of these findings suggest that accountability practices, when not accompanied by active community involvement and open communication, may lead to negative public perceptions. Therefore, enhancing public trust in the management of village funds requires strong information transparency and high responsiveness from village officials.

Keywords: *Accountability, Transparency, Responsiveness in Village Fund Management, Public Trust Level.*

Keywords: *Accountability, Transparency, Responsiveness in Village Fund Management, Public Trust Level.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsiviness Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon”**. Penulis mengirimkan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan doa banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua kakak kandung yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moral, emosional, dan finansial selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Cirebon.
2. Bapak Arif Nurudin, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Bapak Dr. Asep Gunawan, M.Si., CHRA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon.
4. Bapak H. M. Taufik Azis, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon.

5. Ibu Itat Tatmimah, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang telah meluangkan waktu dan bersedia membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi.
6. Ibu Muzayyanah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah meluangkan waktu dan bersedia membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis saat menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Cirebon.
8. Kepala desa dan seluruh Staff Karyawan Desa Bojong Kulon Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 yang telah bekerja sama dan berjuang untuk mencapai hasil akhir.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kontribusinya untuk kelancaran skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Cirebon, 01 Maret 2025

Penulis

Moh Abdul Azis

NIM. 210121085

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Landasan Teori	25
2.2.1 Teori Legitimasi	25
2.2.2 Kepercayaan Masyarakat	26
2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.2.4 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	29
2.2.5 Transparansi	31

2.2.6	<i>Responsiveness</i>	33
2.3	Kerangka Konseptual	34
2.4	Hipotesis	35
2.4.1	Pengaruh Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat	35
2.4.2	Pengaruh Persepsi Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat	37
2.4.3	Pengaruh Persepsi <i>Responsiveness</i> terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	38
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		40
3.1	Metode Penelitian.....	40
3.2	Definisi Operasional Variabel	40
3.2.1	Variabel Dependen.....	41
3.2.2	Variabel Independen	42
3.3	Populasi dan Sampel	45
3.3.1	Populasi.....	45
3.3.2	Sampel.....	46
3.4	Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.5	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Teknik Analisis Data	50
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	51
3.6.2	Pengujian Kualitas Data	51
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.6.4	Model Regresi Linier Berganda	55
3.6.5	Uji Hipotesis	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Penelitian	58
4.1.1 Profil Lokasi Penelitian.....	58
4.1.2 Karakteristik Responden	60
4.2 Hasil Penelitian.....	62
4.2.1 Statistik Deskriptif	62
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	64
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	66
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	69
4.2.5 Uji Hipotesis	71
4.3 Pembahasan	73
4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	73
4.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat.....	76
4.3.3 Pengaruh Responsivitas terhadap Kepercayaan Masyarakat	78
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
5.2.1 Saran Praktisi	83
5.2.2 Saran Peneliti Selanjutnya.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Dana Desa Bojong Kulon Tahun 2022 - 2024.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen	41
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen	43
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian	48
Tabel 3. 4 Skala Likert 5 Tingkat	50
Tabel 4. 1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4. 2 Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	61
Tabel 4. 3 Jumlah Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Desa Bojong Kulon	62
Tabel 4. 4 Analisis Statistik Deskriptif	63
Tabel 4. 5 Uji Validitas	65
Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas	66
Tabel 4. 7 Uji Normalitas.....	67
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 4. 10 Analisis Regresi Linear Berganda	70
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	71
Tabel 4. 12 Uji t (Parsial).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	35
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif terhadap masyarakat, diperlukan penerapan *Good Governance*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pemahaman bahwa desa merupakan sekelompok masyarakat yang terstruktur secara hukum dengan batas wilayah yang jelas. Desa diberikan kewenangan serta sumber dana yang memadai untuk mengelola potensinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa warga setempat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui serta dihormati oleh pemerintah Indonesia. Sebagai daerah otonomi baru, desa yang memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima anggaran dari pemerintah pusat dengan nominal tertentu (Sofyani & Tahar, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup berbagai tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan disiplin dan keteraturan anggaran.

Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan desa, pengurangan kemiskinan, serta mengatasi kesenjangan. Berdasarkan data pemerintah, alokasi Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp71,2 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp950 juta. Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi Rp72 triliun dengan rata-rata Rp960 juta per desa. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan alokasi menjadi Rp68 triliun dengan rata-rata Rp900 juta per desa. Tahun 2023, kebijakan pengalokasian Dana Desa menerapkan skema Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF) dengan total anggaran sebesar Rp70 triliun, sehingga rata-rata setiap desa menerima Rp930 juta. Pada tahun 2024, Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp71 triliun dengan rata-rata Rp940 juta per desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp71 triliun sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp69 triliun dialokasikan sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula, sementara Rp2 triliun disediakan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan selama tahun anggaran berjalan atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Melalui kebijakan tersebut, telah ditetapkan alokasi tambahan Dana Desa untuk insentif desa yang diberikan kepada 15.124 desa. Insentif ini

diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik berdasarkan dua kriteria utama, yaitu kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama mencakup indikator tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi. Sementara itu, kriteria kinerja mencakup aspek kinerja pemerintah desa, yang terdiri atas kinerja keuangan dan pembangunan desa, tata kelola keuangan serta akuntabilitas keuangan desa, serta penghargaan yang diterima desa dari kementerian atau lembaga negara.

Selain itu, kebijakan penyaluran Dana Desa mengikuti ketentuan dalam Pasal 25 PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, kebijakan penggunaan Dana Desa mengacu pada Pasal 16 ayat (5) PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan data statistik, alokasi dana desa di Desa Bojong Kulon dari tahun 2022 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Dana Desa Bojong Kulon Tahun 2022 - 2024

Tahun	Jumlah Dana
2022	1.079.105.000
2023	1.124.119.000
2024	993.170.000

Sumber: Data Statistik Desa Bojong Kulon Tahun 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa dana desa di Bojong Kulon mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp1.124.119.000, sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp993.170.000. Berdasarkan hasil wawancara

awal dengan salah satu warga di Desa Bojong Kulon (10 Mei 2024, pukul 20.00), masyarakat mengaku ragu terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi, seperti tidak adanya baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi akses utama masyarakat dalam mengetahui penggunaan dana desa. Selain itu, masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Meskipun dana desa diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan, terdapat kekhawatiran terkait potensi korupsi dan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Jika transparansi tidak diterapkan dalam pengelolaan dana desa, potensi penyimpangan semakin besar. Bahkan, terdapat oknum yang seharusnya menjadi kepercayaan masyarakat justru tergiur dengan besarnya dana yang tersedia, sehingga kasus korupsi dan penggelapan dana desa semakin marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pertanggungjawaban penuh dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut. Kompetensi aparatur desa dan regulasi yang relatif baru menyebabkan potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan (Azizah & Kholifah R, 2023).

Keberadaan Undang-Undang Desa baru menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama terkait potensi korupsi dan inefisiensi keuangan negara di tingkat desa. Hal ini diperparah dengan adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Sofyani & Tahar, 2021).

Menurut Arwati & Verdania Latif (2021), kepercayaan masyarakat merupakan penilaian bersama dari kelompok tertentu terhadap keandalan dan integritas suatu entitas dalam memenuhi komitmennya tanpa merugikan pihak lain. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat tumbuh melalui transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta penyampaian informasi yang jelas mengenai kebijakan dan program yang dijalankan (Azizah & Kholifah R, 2023). Salah satu strategi utama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat adalah dengan menerbitkan laporan keuangan dan kinerja secara berkala yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Jika pemerintah desa tidak mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan serta menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Oktavia, 2020).

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga atau organisasi merupakan faktor fundamental yang menentukan partisipasi dan dukungan publik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Ikhsan & Desitama, 2023). Dalam konteks pengelolaan dana di Desa Bojong Kulon,

tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana dana tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kepercayaan ini tidak hanya berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap integritas pengelola dana, tetapi juga mencerminkan pengalaman empiris masyarakat dalam mengamati transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa (Beshi & Kaur, 2020).

Kepercayaan masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan partisipasi dalam program desa, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat keberlanjutan pembangunan desa (Prihatin & Mustaqim, 2023). Jika masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat (Imawan & Purwanto, 2020). Sebaliknya, jika terdapat ketidakjelasan dalam pengelolaan dana, maka tingkat kepercayaan dapat menurun yang berpotensi menghambat program pembangunan desa (Oktavia, 2020).

Teori Legitimasi menekankan pentingnya memenuhi harapan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Deegan, 2002). Teori ini menyatakan bahwa suatu organisasi atau entitas, dalam hal ini pemerintah desa, harus bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat agar tetap mendapatkan dukungan dan kepercayaan (Aprilia, 2019). Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi faktor utama dalam membangun legitimasi pemerintah desa. Jika pemerintah desa mampu mengelola keuangan dengan baik dan

memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat. Sebaliknya, jika pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas dan efektivitas pemerintahan desa (Restufiani, 2022).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana merujuk pada sejauh mana pengelola dana bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah (Karneji Sumarlin Bucika Sormin, 2024). Akuntabilitas ini mencakup aspek pelaporan, penggunaan dana yang sesuai dengan regulasi, serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait pengeluaran dan hasil yang dicapai (WidyaLestari, 2021). Dalam penelitian ini, akuntabilitas berperan sebagai faktor utama yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana di Desa Bojong Kulon .

Jika akuntabilitas dalam pengelolaan dana tinggi, maka masyarakat akan merasa yakin bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Sebaliknya, jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana atau kurangnya pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola, maka kepercayaan masyarakat cenderung menurun (Mansoor, 2021). Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang jelas dan aksesibilitas informasi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena transparansi dalam pertanggungjawaban keuangan (Aprilia, 2019; Beshi & Kaur, 2020; Mansoor, 2021; Pratolo et al., 2022). Namun, penelitian lain menemukan bahwa meskipun akuntabilitas diterapkan, kepercayaan masyarakat tetap rendah akibat kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana (Arfiansyah, 2021; Imawan & Purwanto, 2020; Sofyani & Tahar, 2021).

Transparansi merupakan prinsip yang memastikan bahwa seluruh informasi terkait pengelolaan dana tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat . Transparansi mencakup keterbukaan dalam pelaporan keuangan, publikasi anggaran desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Pahlevi et al., 2022). Keberadaan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan dana dapat memperkuat kepercayaan masyarakat karena mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana dana dikelola dan untuk apa dana tersebut digunakan (Nislandi & Munari, 2023).

Menurut Malinda et al. (2024), ketika transparansi diterapkan dengan baik, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi penggunaan dana, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau korupsi. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menimbulkan spekulasi negatif dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi keuangan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih memahami penggunaan anggaran (Beshi & Kaur, 2020; Mansoor, 2021; Sofyani & Tahar, 2021). Namun, studi yang dilakukan oleh Aprilia (2019) dan Azizah & Kholifah R (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu meningkatkan kepercayaan, karena masyarakat sering meragukan keabsahan data yang diberikan oleh pemerintah desa.

Responsivitas merujuk pada kemampuan pengelola dana dalam merespons kebutuhan dan masukan dari masyarakat (Widaningrum & Fahriani, 2023). Dalam konteks ini, responsivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah desa cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan menyesuaikan kebijakan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa responsif terhadap kebutuhan mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi (Mochtar et al., 2022).

Responsivitas dalam pengelolaan dana dapat diwujudkan melalui forum diskusi, musyawarah desa, atau mekanisme pengaduan yang efektif (Azizah & Kholifah R, 2023). Menurut Hafid Risalbi et al. (2021), jika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diakomodasi dalam kebijakan pengelolaan dana, maka kepercayaan mereka terhadap pengelola dana akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika responsivitas rendah dan

pemerintah desa terkesan tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat akan cenderung melemah.

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa penerapan kedua faktor ini tidak selalu memberikan dampak yang signifikan. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana. Sementara itu, responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang juga berperan dalam membangun kepercayaan. Ketika pemerintah desa menunjukkan responsivitas yang tinggi, masyarakat cenderung merasa lebih dihargai dan percaya bahwa pengelolaan dana dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan mereka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsiveness Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan , maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya akses informasi terkait pengelolaan dana desa sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat terhadap perangkat desa.

2. Dana desa mengalami fluktuasi signifikan dari tahun 2022 hingga 2024, menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan desa.
3. Masyarakat meragukan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan khawatir tentang potensi korupsi serta inefisiensi keuangan desa.
4. Besarnya dana desa meningkatkan risiko penyimpangan dan korupsi, sementara aparatur desa tidak siap mengelola dana sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini fokus pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Bojong Kulon, yang menurunkan kepercayaan masyarakat. Masalahnya mencakup tidak adanya Baliho APBDes, minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya keterbukaan dalam pelaporan, dan fluktuasi dana desa dari tahun 2022 hingga 2024. Kekhawatiran tentang potensi korupsi dan inefisiensi ditambah dengan kompetensi aparatur desa yang masih rendah serta pengawasan yang belum optimal. Diperlukan strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan yang terbuka.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon?
2. Apakah transparansi dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon?
3. Apakah *responsiveness* pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap kepercayaan masyarakat Desa Bojong Kulon.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat Desa Bojong Kulon.
3. Untuk mengetahui pengaruh *responsiveness* pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat Desa Bojong Kulon.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek utama:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang konsep akuntabilitas dan

transparansi dana desa khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Muhammadiyah.
- b. Bagi Pemerintahan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintahan pedesaan dalam rangka memberikan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Lailatus Sa'adah, dan Moh. Syadel (2021), Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kualitas	Variable independen • Akuntabilitas • Transparansi Variabel dependen • Kepercayaan masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	Pengelolaan tata kelola desa yang baik secara positif mempengaruhi variabel dependen.	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: • Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Pelayanan (Studi Pada Desa-Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)			independen Tempat penelitian yang berbeda
2	Della Yully Arianti & Deviani (2023) Pengaruh Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat: Suatu Presepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin	Variable independen - Presepsi Akuntabilitas - Presepsi Transaparansi - Presepsi Reposisivenes Variabel dependen - Kepercayaan masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	Pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif tingkat Kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin.	Persamaan: - Penelitian kuantitatif - Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: - Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen - Tempat penelitian yang berbeda

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
3	Dewi Kusuma Wardani & Ratih Ranika Putri Utami (2020), Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoarjo	Variable independen • Transparansi • Pengelolaan • Pemberdayaa n Masyarakat Variabel dependen • Kepercayaan masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa dana tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidu	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: • Menambahkan Akuntabilitas dan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen • Tempat penelitian yang berbeda
4	Hafiez Sofiyani & Afrizal Tahar pada (2021), Peran	Variable independen • Akuntabilitas • Trnsparansi	Studi ini menemukan bahwa transparansi	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Melibatkan 2

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul	Variabel dependen Kepercayaan masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	meningkatkan kepercayaan masyarakat desa sementara akuntabilitas sebaliknya.	variabel independen yang sama yaitu Akuntabilitas dan Transparansi - Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: - Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen - Tempat penelitian yang berbeda
5	Ikhsan & Faizal	Variable	hanya	Persamaan:

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Satria Desitama (2023), 'Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung	independen • Akuntabilitas • Pendapatan asli daerah Variabel dependen • Kepercayaan masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	pendapatan asli berpengaruh daerah signifikan yang terhadap kepercayaan masyarakat. Sedangkan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.	• Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Persamaan: • Menambahkan Transparansi dan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen • Tempat penelitian yang berbeda
6	Hawara Djafar, Rio Monarfa & Siti Pratiwi Husain (2024), Pengaruh	Variable independen • Akuntabilitas • Transparansi	Akuntabilitas dan Transparansi secara parsial berpengaruh secara positif dan	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo"	Variabel dependen Kepercayaan masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Desa Payu Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo Kemudian, transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh secara signifikansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.	dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: - Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen - Tempat penelitian yang berbeda
7	Andika Subandra,	Variable independen	Transparansi tidak	Persamaan: Penelitian

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Usdeldi& Eri Nofriza (2022), Ramadhani & Amin (2023), Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	• Transparansi • Akuntabilitas • Partisipasi Masyarakat Variabel dependen • Pengelolaan Keuangan Desa Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.	kuantitatif • Menggunakan variable independent yang berfokus kepada Transparansi dan Akuntabilitas Perbedaan: • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat • Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen • Tempat

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
			secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.	penelitian yang berbeda
8	Maya Dwi Nirmala, Nedi Hendri & Elmira Febri Darmayanti (2023), Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Putra Buyut Gunung Sugih Lampung Tengah	Variable independen • Transparansi • Akuntabilitas • Penggunaan Alokasi Dana Desa Variabel dependen • Kepercayaan Masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	Akuntabilitas, transparansi dan penggunaan ADD berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat di Desa Putra Buyut Gunung Sugih Lampung Tengah	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: • Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
				variabel independen Tempat penelitian yang berbeda
9	Eni Dwi Susliyanti & Enita Binawati pada (2020), Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa	Variable independen - Akuntabilitas Keuangan - Akuntabilitas Kinerja Variabel dependen - Kepercayaan Masyarakat Metode Penelitian: Analisis regresi linear berganda	Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa, akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa	Persamaan: - Penelitian kuantitatif - Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: - Menambahkan Transaparansi dan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen - Tempat penelitian

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
				yang berbeda
10	Pratolo et al. (2022), <i>The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality</i>	Variable independen • Akuntabilitas • Transparansi Variabel dependen • Kepercayaan Masyarakat Variabel Intervening • Kualitas Layanan COVID-19 Metode Penelitian: analisis kuantitatif pendekatan <i>Partial Least Squares - Structural Equation Modeling</i> (PLS-SEM).	akuntabilitas berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan transparansi tidak berpengaruh. Namun, kualitas layanan penanganan COVID-19 berpengaruh positif signifikan dan mampu memediasi hubungan antara akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: • Menambahkan <i>responsiveness</i> Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel independen • Tempat penelitian yang berbeda

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
11	Beshi & Kaur (2020), <i>Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices</i>	Variable independen • Akuntabilitas • Transparansi • Responsivitas Variabel dependen • Kepercayaan Masyarakat Metode Penelitian: analisis kuantitatif pendekatan <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i> via AMOS	Semua aspek good governance berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik, dengan responsivitas sebagai faktor dominan.	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: • Tempat penelitian yang berbeda
12	Hartanto et al. (2021), <i>Antecedents of Public Trust in Government During the</i>	Variable independen • Media sosial pemerintah • Respons pemerintah	Media sosial, e-gov, dan respons pemerintah meningkatkan kepercayaan publik, terutama	Persamaan: • Penelitian kuantitatif • Menggunakan variable dependent

No	Penulis, Judul	Variabel & Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	<i>COVID-19 Pandemic in Indonesia</i>	- e-Governance Variabel dependen - Kepercayaan publik Variabel mediasi - Persepsi nilai religius Metode Penelitian: analisis kuantitatif pendekatan <i>SEM-PLS via SmartPLS 3</i>	jika didukung nilai-nilai religius.	yang berfokus kepada Tingkat Kepercayaan Masyarakat Perbedaan: Objek penelitian yang berbeda

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 . Menurut Deegan (2002) organisasi selalu berupaya memastikan kalau mereka beroperasi pada batasan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, teori legitimasi berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuat. Legitimasi pemerintah didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dan keabsahan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk dapat diterima dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan (Apriliana, 2019). Deegan (2019) mengargumentasikan teori legitimasi memiliki prinsip dasar bahwa organisasi yang sukses menuntut pemimpin untuk memastikan organisasi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat dan dengan cara itu dianggap sah. Ketika harapan masyarakat terhadap pemerintah terpenuhi, pemerintah desa dapat memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi berkaitan erat dengan pemerintahan desa untuk mengelola dana desa yang baik agar dapat diterima dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

2.2.2 Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengacu pada keyakinan bahwa pemerintah melakukan hal yang benar untuk bertindak secara jujur atas nama publik (Beshi & Kaur, 2020). Kepercayaan pada pemerintah sangat diperlukan untuk berfungsinya pemerintah yang demokratis secara efektif. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting karena ini membahas mengenai kualitas hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintahan mereka (Beshi & Kaur, 2020). Menurut Yousaf et al. (2016) untuk mendapatkan kepercayaan, pemerintah harus memerintah dengan lebih baik dengan cara lebih transparan, bertanggungjawab,

akuntabel dan responsif dengan keterlibatan yang lebih aktif dengan publik dan khususnya penghormatan yang lebih tinggi terhadap hukum dan kepentingan publik.

Menurut Peppers dan Rogers (2018) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah keyakinan yang dimiliki satu pihak terhadap konsistensi, ketahanan, dan integritas pihak lain dalam sebuah hubungan, serta keyakinan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tersebut adalah yang terbaik dan akan menghasilkan dampak positif bagi pihak yang dipercayai. Kepercayaan memiliki peranan penting dalam kesuksesan hubungan. Kepercayaan, sikap, dan perilaku memiliki keterkaitan saling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Ketiganya memiliki interaksi yang memengaruhi satu sama lain, di mana kepercayaan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap. Sikap, pada banyak kasus, dapat membentuk perilaku individu. Beberapa literatur telah memberikan definisi mengenai kepercayaan (trust) yang mengatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dari mitra dalam suatu pertukaran. Kepercayaan melibatkan kemauan seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu karena ia percaya bahwa mitranya akan memenuhi harapannya. Hal ini juga mencakup harapan umum bahwa ucapan, janji, atau pernyataan dari orang lain dapat diandalkan, seperti yang dijelaskan oleh Barnes (Oktavia, 2020). Kepercayaan merujuk pada kemauan individu untuk bergantung pada orang lain di mana ada

kepercayaan dalam dirinya. Kepercayaan muncul sebagai suatu kondisi mental yang dipengaruhi oleh situasi personal dan konteks sosialnya. Saat mengambil keputusan, seseorang lebih mungkin memilih pilihan yang berasal dari individu yang dapat dipercayai daripada mereka yang kurang dipercayai.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.20 Tahun 2018, Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan serta pembangunan desa sangat signifikan, sesuai dengan konsep bahwa desa adalah entitas yang mencakup masyarakat adat yang memiliki otoritas dalam mengelola kegiatan mereka sendiri.

Pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, adalah semua tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban terkait keuangan Desa.

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari provinsi, serta pendapatan asli desa (PADes). Semua transaksi

keuangan desa ini akan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya harus sesuai dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah desa tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola keuangan desa, meskipun kepala desa memiliki wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang mewakili pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan staf perangkat desa lainnya.

2.2.4 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban (Freddy Aktif Era Sianturi dan Adenantera Dwicaksono (2023).

Sementara itu, Mardiasmo (2017) dalam Azhar (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut haris (2019) dalam Irma (2021) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Akuntabilitas terdiri dari dua macam menurut Mardiasmo (2017) dalam Dwiyanti (2019) yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Widiyanti, A. (2019) Dimana akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas yang dilakukan lembaga negara kepada warga negara baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga negara kepada lembaga akuntabilitas yang dibentuk dilingkungan internal negara sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa

segala tindakan pemerintah harus memperoleh pengawasan dari masyarakat.

2.2.5 Transparansi

Suwanda (2019: 43) menyatakan transparansi adalah pertimbangan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui informasi keuangan desa secara terbuka, jujur serta menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa yang mengelola sumber daya yang diamanahkan pada entitas pelapor serta ketaatan peraturan Undang-Undang. Sedangkan Transparansi menurut (Mansoor, 2021). Transparansi berkaitan dengan penyediaan informasi tentang proses keputusan utama, fungsi dan kinerja pemerintah Akses informasi yang terbuka dari pemerintah mencerminkan transparansi dan menciptakan anggapan bahwa pemerintah bertindak sesuai aturan yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kepercayaan publik (Mansoor, 2021). Selain itu dengan adanya transparansi juga bisa menjadi media untuk pemerintahan menjadi saling terbuka dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020).

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan transparansi artinya pemerintah desa secara rutin mengungkapkan hal-hal penting kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat dalam penyelenggaraannya, sehingga asas keterbukaan memungkinkan masyarakat mendapatkan dan mudah memahami informasi tentang

keuangan desa secara menyeluruh. Selain itu transparansi merupakan prinsip good governance.

Melalui transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang aktual dan faktual, antara lain:

1. Membandingkan kinerja keuangan desa dengan rencana program.
2. Mengevaluasi ada tidaknya tindakan korupsi dalam suatu perencanaan hingga anggaran.
3. Mengetahui apakah pemerintah desa telah menjalankan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengetahui hak dan kewajiban antara pemerintah desa dengan masyarakat serta dengan pihak terkait lainnya.

Menurut Ellwood (dalam Rachmawaty, 2015) mengemukakan berbagai dimensi transparansi yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Transparansi kejujuran dan hukum Transparansi kejujuran berkaitan dengan sikap keterbukaan atas tindakan yang tidak bertentangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, sementara itu transparansi hukum merupakan sistem yang berkaitan untuk memastikan adanya suatu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Transparansi proses Prosedur pelaksanaan tugas terkait dengan kecukupan informasi yang diberikan kepada publik.
3. Transparansi program Hal tersebut terkait dengan realisasi tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan pertimbangan

memberikan hasil yang terbaik.

4. Transparansi kebijakan Hal tersebut terkait dengan keterbukaan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuannya.

2.2.6 Responsiveness

Responsiveness berarti keyakinan bahwa pemerintah mendengarkan dan peduli tentang apa yang masyarakat katakan (Mansoor, 2021). Pemerintah perlu menunjukkan responsivitasnya dengan menjadi peka dan tanggap mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan (Nawawi, 2012). Tata kelola yang baik menganjurkan bahwa pemerintah harus menanggapi keprihatinan publik pada waktunya untuk membangun tata kelola yang baik.

Menurut (Siagian, 2019), responsivitas merupakan kemampuan aparatur untuk menghadapi dan mengantisipasi tujuan baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. (Tangkilisan, 2005) mendefinisikan responsivitas sebagai kapasitas birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membuat agenda dan prioritas pelayanan, serta membuat program pelayanan yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas merupakan bentuk respon atau tanggapan oleh pihak penyedia layanan dalam membantu dan menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk pelayanan. Responsivitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik karena untuk mengenali kebutuhan masyarakat

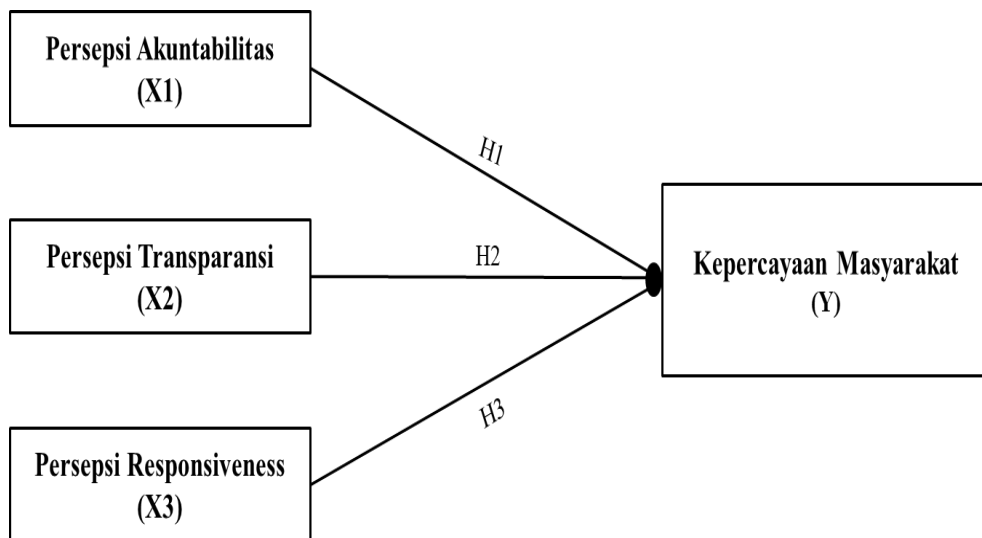
(Riadi, 2022). Responsivitas menjadi salah satu indikator pelayanan yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik (RI, Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009,). Responsivitas memiliki beberapa indikator menurut (Hardiansyah, 2011) yakni:

- 1) Merespon pihak yang membutuhkan layanan.
- 2) Melakukan pelayanan dengan cepat.
- 3) Melakukan pelayanan dengan tepat.
- 4) Melakukan pelayanan dengan cermat.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan *responsiveness* terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di desa Bojong Kulon. Teori letimigasi menjadi landasan utama dalam meneliti bagaimana pemerintahan desa bisa mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat di desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di buat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya kepada pihak berkepentingan, terutama masyarakat (Mardiasmo, 2002). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas mencerminkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan yang dapat memperkuat kepercayaan publik. Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus beroperasi sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat untuk memperoleh legitimasi (Deegan, 2019). Pemerintah desa yang akuntabel lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan

masyarakat, sementara kurangnya akuntabilitas dapat mengurangi legitimasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Sejumlah penelitian mendukung bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Yousaf et al. (2016) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu lembaga, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Penelitian ini sejalan dengan temuan Beshi & Kaur (2020) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan secara transparan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah serta memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keadilan dalam pengambilan keputusan. Hartanto et al. (2021) dan Apriliana (2019) juga menguatkan argumen ini, di mana mereka menemukan bahwa pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya secara jelas dan terbuka cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, penelitian Nurrizkiana et al. (2017) dan Bani Pamungkas (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan. Berdasarkan berbagai temuan ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Persepsi akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

2.4.2 Pengaruh Persepsi Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam menyediakan akses informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama terkait pengelolaan keuangan dan kebijakan publik (Nordiawan, 2010). Ketika pemerintah desa memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan dan kepentingan publik. Teori Legitimasi menjelaskan bahwa transparansi menjadi alat bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma dan harapan masyarakat (Deegan, 2019). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah menjalankan tugasnya dengan adil dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Sejumlah penelitian mendukung bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Sofyani & Tahar (2021) menemukan bahwa keterbukaan informasi keuangan oleh pemerintah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Beshi & Kaur (2020) dan Yousaf et al. (2016) yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan menciptakan persepsi positif terhadap integritas pemerintah. Mansoor (2021) juga menegaskan bahwa pemerintah yang menerapkan transparansi lebih

mampu membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan legitimasi, serta memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya mencegah ketidakpercayaan, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Berdasarkan pembahasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Persepsi transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

2.4.3 Pengaruh Persepsi *Responsiveness* terhadap Kepercayaan Masyarakat

Responsiveness mengacu pada sejauh mana pemerintah bersikap responsif dan tanggap terhadap permasalahan serta keluhan masyarakat. Pemerintah yang cepat menanggapi kebutuhan warga akan menciptakan rasa yakin bahwa mereka dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Persepsi *responsiveness* dapat diukur dari kesediaan pemerintah dalam merespons permintaan, keterlibatan dalam interaksi dengan masyarakat, serta efektivitas dalam memberikan umpan balik masyarakat (Widaningrum & Fahriani, 2023). Teori Legitimasi menjelaskan bahwa daya tanggap pemerintah berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, karena pemerintah yang responsif menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kepentingan publik dan berupaya memenuhi harapan masyarakat. Sebaliknya, kurangnya *responsiveness* dapat menimbulkan ketidakpastian dan

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Mochtar et al., 2022).

Sejumlah penelitian mendukung bahwa *responsiveness* memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Mochtar et al. (2022) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat daya tanggap pemerintah, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Penelitian ini sejalan dengan Hartanto et al. (2021) dan Hafid Risalbi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pemerintah yang cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat mampu meningkatkan legitimasi serta persepsi positif dari warganya. Mansoor (2021) juga menegaskan bahwa respons yang efisien dari pemerintah tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan demikian, *responsiveness* tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah dalam menangani keluhan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Persepsi *responsiveness* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bersifat deskriptif. Menurut Syafrida Hafni Sahir (2022), pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif memanfaatkan teknik statistik dan berbagai alat analisis data untuk mengolah informasi, sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk numerik. Lebih khusus, penelitian deskriptif dirancang untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara akurat melalui pengumpulan dan pengolahan data yang terstruktur (Syafrida Hafni Sahir, 2022). Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa metode kuantitatif berlandaskan paradigma positivisme dan diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan data menggunakan instrumen tertentu, kemudian dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sebelum menarik kesimpulan.

Definisi operasional variabel berfungsi untuk memberikan batasan dan menentukan cara pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2018), variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat, kriteria, atau konsekuen. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Kepercayaan Masyarakat. Peppers dan Rogers (2018) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari kesediaan mereka untuk mengikuti aturan, berpartisipasi aktif dalam program pemerintah, memberikan umpan balik yang jujur, serta menunjukkan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepercayaan masyarakat (Y)	Kepercayaan masyarakat diartikan sebagai keyakinan dan sikap positif terhadap suatu sistem atau institusi. Kepercayaan masyarakat dapat meningkatkan stabilitas sosial, partisipasi aktif	a. Saya percaya bahwa dana desa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. b. Saya merasa pengelola dana desa bekerja dengan jujur	Likert 1-5

	dalam pembangunan, serta dukungan terhadap kebijakan publik	dan adil. c. Saya mendukung pengelolaan dana desa oleh pihak yang saat ini menjabat. d. Saya percaya bahwa ada pengawasan yang baik terhadap dana desa. e. Saya yakin dana desa dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi.	
--	---	---	--

Sumber: data hasil pengolahan peneliti, 2025

3.2.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2018), variabel independen dapat juga dikenal sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau variabel bebas. Variabel ini merupakan faktor yang memberikan pengaruh atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas merujuk pada keharusan sebuah entitas untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan maupun tindakannya, terutama kepada stakeholder, termasuk publik (Mardiasmo, 2002)	a. Pengelola dana desa memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. b. Laporan penggunaan dana mudah diakses oleh masyarakat c. Dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati d. Pengelola dana desa bertindak profesional dan bertanggung jawab. e. Masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kinerja pengelola dana.	Likert 1-5

Transparansi (X2)	Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam memberikan akses informasi kepada publik, khususnya mengenai pengelolaan dana dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. (Nordiawan, 2010)	a. Informasi mengenai dana desa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. b. Masyarakat mengetahui jumlah dan alokasi dana desa setiap tahun c. Mekanisme penyaluran dana desa dijelaskan secara jelas dan rinci. d. Informasi tentang penggunaan dana mudah dipahami oleh masyarakat awam. e. Tidak ada indikasi penyembunyian informasi oleh pengelola dana desa.	Likert 1-5
<i>Responsiveness</i> (X3)	<i>Responsiveness</i> merujuk pada kemampuan	a. Pengelola dana desa cepat tanggap terhadap	Likert 1-5

	pemerintah dalam merespons dan menanggapi berbagai masalah serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.	kebutuhan masyarakat. b. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa. c. Keluhan masyarakat terkait dana desa segera ditindaklanjuti. d. Program yang dibiayai dana desa mencerminkan kebutuhan warga. e. Aspirasi warga selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.	
--	---	---	--

Sumber: data hasil pengolahan peneliti, 2025

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas serta karakteristik

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis guna menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup seluruh Warga Desa Bojong Klon yang berjumlah 10.147 jiwa.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti berdasarkan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode Non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel, teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- Merupakan kepala keluarga yang berdomisili di Desa Bojong Kulon,
- Berusia minimal 17 tahun,
- Mengetahui atau pernah mendapatkan informasi terkait penggunaan dana desa,

Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: Ukuran Sampel

N: Ukuran Populasi

e: Error (0,1)

Berikut ini perhitungan menentukan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin*.

$$n = \frac{10.147}{1+10.147(0,1)^2} = 99,02$$

Berdasarkan perhitungan, ukuran sampel yang dapat diambil adalah sekitar 99,02 dan angka ini dapat dibulatkan menjadi 100 untuk memudahkan pengambilan sampel.

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Februari dan berlangsung hingga seluruh tahapan penelitian selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan angket tertutup yang ditujukan kepada responden Warga Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner akan diterapkan dengan menyusun daftar pertanyaan/ Pernyataan yang kemudian akan disebarkan kepada Warga Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Kuesioner yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka memuat pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara bebas sesuai pandangan mereka. Sementara itu, kuesioner tertutup berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan, dimana responden hanya perlu memilih opsi yang paling sesuai. Metode ini memudahkan proses pengisian bagi responden sekaligus

mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Metode pengukuran dalam kuesioner yang digunakan adalah skala likert tingkat 5, yaitu suatu skala yang memiliki nilai mulai dari sangat negatif hingga sangat positif terhadap objek sikap. Skala likert 5 tingkat yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Skala Likert 5 Tingkat

Skor	Tingkat Persetujuan
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat setuju

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis data kuantitatif deskriptif untuk menginterpretasikan hasil kuesioner. Selain itu, digunakan pula analisis regresi linier berganda guna menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus memverifikasi hipotesis. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tiga variabel bebas dan

satu variabel terikat. Untuk mempermudah proses perhitungan statistik, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS (Ghozali, 2018).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta variabel-variabel dalam penelitian. Teknik ini memaparkan distribusi frekuensi suatu variabel melalui beberapa ukuran pemusatan dan penyebaran data, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), median, serta standar deviasi (simpangan baku). Nilai minimum merepresentasikan angka terendah dalam kumpulan data, sementara nilai maksimum menunjukkan angka tertinggi yang tercatat. Dengan demikian, statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang sebaran dan kecenderungan data yang dianalisis.

3.6.2 Pengujian Kualitas Data

Menurut Ghozali (2018), Sebelum melakukan analisis data dengan kuantitatif korelasi menggunakan teknik analisis uji regresi sederhana, maka harus dilakukan beberapa uji persyarat yakni :

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas angket dilakukan dengan menggunakan correlation person yaitu

mengkorelasikan skor item masing-masing nomor dengan total skor item, peneliti hanya akan menggunakan soal-soal yang terbukti valid dari hasil analisis instrumen. Hasil analisis perhitungan validitas butir soal (sig) dikonsultasikan dengan α (0.05) , dengan taraf signifikan 5 %. Bila harga $\text{sig} > \alpha$ maka butir soal tersebut dikatakan valid. Sebaliknya bila harga $\text{sig} > \alpha$ maka butir soal tersebut dikatakan tidak valid.

Perhitungan validitas item angket dilakukan dengan penafsiran koefisien korelasi, yakni $r_{xy\text{hitung}}$ dibandingkan dengan $r_{xy\text{tabel}}$. Adapun nilai $r_{xy\text{tabel}}$ untuk validitas item angket adalah 0,5. Artinya, apabila sig lebih besar atau sama dengan 0,5 ($r_{xy} \geq 0,5$), maka item angket tersebut dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, peneliti melanjutkan uji reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas angket, digunakan perhitungan dengan teknik Alpha Cronbach's. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap variabel diukur dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Ada dua alasan peneliti menggunakan uji Cronbach's Alpha. Pertama, karena teknik ini merupakan teknik pengujian keandalan kuesioner yang paling

sering digunakan. Kedua, dengan melakukan uji Cronbach's Alpha maka akan terdeteksi indikator-indikator yang tidak konsisten.

Perhitungan angket dilakukan dengan cara mengkonsultasikan koefisien reliabilitas hitung nilai kritik atau standar reliabilitas. Adapun nilai kritik untuk reliabilitas angket adalah 0,5. Artinya, apabila nilai kritik untuk reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,5 ($r_i \geq 0,5$), maka angket tersebut dikatakan reliabil..

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier yang digunakan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yaitu estimator terbaik dan tidak bias. Pengujian ini diperlukan agar sampel data yang digunakan benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak.

Metode Pengujian:

- Analisis grafik (histogram dan *normal probability plot*).
- Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

- a) Jika $\text{sig} > 0,05 \rightarrow$ residual berdistribusi normal.
- b) Jika $\text{sig} < 0,05 \rightarrow$ residual tidak berdistribusi normal.

Pada analisis grafik, asumsi normalitas terpenuhi jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dalam normal probability plot, atau jika histogram menunjukkan pola distribusi normal. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

- a) Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10 \rightarrow$ tidak terjadi multikolinearitas.
- b) Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ dan VIF $\geq 10 \rightarrow$ terjadi multikolinearitas.

Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar variabel independen karena dapat menyebabkan bias dalam estimasi parameter regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varians residual yang tidak merata

antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas (varians residual yang konstan).

Metode Pengujian:

- Uji *Glejser*

Kriteria Pengambilan Keputusan:

- Jika $\text{sig} \geq 0,05 \rightarrow$ tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika $\text{sig} < 0,05 \rightarrow$ terjadi heteroskedastisitas.

Jika model regresi mengalami heteroskedastisitas, maka varians residual tidak merata, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak akurat.

3.6.4 Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis statistika yang bertujuan mencari model linier antara variabel bebas (independen) atau regresor terhadap variabel respons atau dependen. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Model regresi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepercayaan Masyarakat
- X1 : Persepsi Akuntabilitas
- X2 : Persepsi Transparansi
- X3 : Persepsi *responsiveness*
- α : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

e : error

3.6.5 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2018), uji hipotesis bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien regresi linier berganda, baik secara parsial (individu) maupun simultan (keseluruhan). Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui dua metode utama, yaitu uji koefisien determinasi (R^2) dan uji t (parsial).

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen.

Interpretasi nilai R^2 :

- a) Jika R^2 mendekati 0 $\rightarrow$ Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat lemah.
- b) Jika R^2 mendekati 1 $\rightarrow$ Model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model regresi dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

2. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Tingkat signifikansi (α): 5% (0,05)

Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, $\rightarrow$ Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $\geq 0,05$, $\rightarrow$ Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan dalam model regresi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojong Kulon yang terletak di wilayah Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Desa Bojong Kulon memiliki luas wilayah sekitar 2.0 km² dan terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Bojong Kulon dan Dusun Garji. Wilayah desa terbagi ke dalam 6 RW dan 31 RT. Lokasi desa ini cukup strategis karena berada di jalur penghubung antar kecamatan dan dekat dengan pasar lokal, sehingga menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Desa Bojong Kulon berada pada daerah dataran rendah dengan kontur tanah yang subur dan cukup potensial untuk kegiatan pertanian. Batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Desa Susukan
- Sebelah selatan: Desa Kedongdong
- Sebelah timur: Desa Tegalgubug
- Sebelah barat: Desa Kejiwan

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Desa Bojong Kulon berdasarkan data terakhir mencapai sekitar 10.147 jiwa dengan 467 kepala keluarga. Komposisi penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 5.183 jiwa dan perempuan 4.964 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat

cukup bervariasi, mulai dari lulusan SD hingga perguruan tinggi, meskipun mayoritas lulusan SMP dan SMA. Mata pencaharian utama masyarakat adalah petani, buruh tani, pedagang kecil, serta sebagian menjadi pegawai swasta dan wiraswasta.

Dalam aspek pemerintahan, Desa Bojong Kulon dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun. Pemerintahan desa secara aktif menjalankan program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber lainnya. Beberapa program yang telah dilaksanakan mencakup pembangunan jalan desa, saluran irigasi, posyandu, serta pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa tergolong baik. Kegiatan musyawarah desa (musdes) secara rutin dilaksanakan guna menampung aspirasi masyarakat terkait penggunaan dana desa. Hal ini menjadi salah satu alasan pemilihan Desa Bojong Kulon sebagai lokasi penelitian, karena mencerminkan praktik pengelolaan dana desa yang cukup aktif dan transparan, serta memungkinkan untuk dianalisis dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, Desa Bojong Kulon dinilai relevan dan representatif sebagai objek penelitian ini.

4.1.2 Karakteristik Responden

a. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil kuesioner, dari 100 orang responden yang mengisi kuesioner ini terdapat 37 orang atau 37% responden berjenis kelamin Perempuan, sedangkan 63 orang atau 63% responden berjenis kelamin laki-laki. Seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	37	37%
Laki - Laki	63	63%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah responden laki-laki yang mengisi kuesioner tersebut lebih banyak daripada responden perempuan.

b. Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Menurut hasil kuesioner, responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Adapun data jumlah responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	26	26%
SMP	20	20%
SMA/SMK	51	51%
D3	1	1%
S1/S2/S3	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan dari tabel tersebut, responden dengan latar belakang SD berjumlah 26 orang, SMP berjumlah 20 orang, SMA/SMK berjumlah 51 orang, dan D13/S1/S2/S3 berjumlah 3 orang, responden dengan latar belakang SMA/SMK memiliki jumlah terbanyak.

c. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Tinggal di Desa Bojong Kulon

Berdasarkan hasil kuesioner, responden memiliki lama tinggal yang bervariasi di Desa Bojong Kulon. Data lengkap mengenai jumlah responden berdasarkan lama tinggal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 3 Jumlah Responden Berdasarkan Lama Tinggal di
Desa Bojong Kulon**

Lama Tinggal di Desa Bojong Kulon	Jumlah	Presentase
< 10 tahun	8	8%
10 – 20 tahun	26	26%
> 20 tahun	66	66%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar responden telah tinggal di Desa Bojong Kulon selama lebih dari 20 tahun, yaitu sebanyak 66 orang atau 66%. Responden yang tinggal antara 10 hingga 20 tahun berjumlah 26 orang (26%), sedangkan yang tinggal kurang dari 10 tahun berjumlah 8 orang (8%).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif :

Tabel 4. 4 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	100	13	25	19,66	2,815
Transparansi	100	11	25	19,42	2,982
Responsiveness	100	13	25	19,61	2,708
Kepercayaan Masyarakat	100	12	25	20,02	2,712
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Penelitian ini mengukur persepsi masyarakat Desa Bojong Kulon terhadap empat variabel utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kepercayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan dana desa.

Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 19,66. Hasil ini mencerminkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dinilai cukup baik oleh masyarakat. Nilai standar deviasi sebesar 2,815 mengindikasikan penyebaran data yang moderat, sehingga perbedaan penilaian antarresponden tidak terlalu besar.

Pada variabel transparansi, nilai minimum tercatat sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata 19,42. Angka ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dari pihak desa dinilai cukup positif oleh masyarakat. Nilai standar deviasi sebesar 2,982

memperlihatkan adanya variasi penilaian antarresponden yang masih dalam kategori wajar.

Responsiveness sebagai variabel berikutnya memiliki nilai minimum sebesar 13 dan maksimum sebesar 25. Rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 19,61 menandakan bahwa masyarakat merasa pihak pengelola dana desa cukup tanggap terhadap kebutuhan dan masukan yang disampaikan. Standar deviasi sebesar 2,708 menunjukkan tingkat penyebaran data yang tergolong moderat dan tidak terlalu menyebar luas dari rata-rata.

Adapun variabel kepercayaan masyarakat menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 20,02. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa berada dalam kategori tinggi. Dengan standar deviasi sebesar 2,712, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepercayaan ini relatif seragam meskipun terdapat sedikit perbedaan antarresponden.

4.2.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas data bertujuan untuk mengukur kevalidan data kuesioner yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan pada uji validitas ini menggunakan Pearson Corelation, dimana dikatakan valid jika nilai Konsistensi alat ukur yang digunakan dalam uji

validitas memiliki kriteria apabila suatu indikator dinyatakan valid dengan syarat $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Dengan menggunakan responden 100 maka nilai r_{tabel} dapat diperoleh. Adapun perhitungannya adalah $df = 100 - 2 = 98$ maka nilai r_{tabel} adalah 0,196.

Tabel 4. 5 Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Akuntabilitas (X1)	1	0,694	0,196	Valid
		2	0,687		Valid
		3	0,642		Valid
		4	0,741		Valid
		5	0,588		Valid
2	Transparansi (X2)	1	0,77	1,196	Valid
		2	0,598		Valid
		3	0,703		Valid
		4	0,761		Valid
		5	0,317		Valid
3	Responsiviness (X3)	1	0,717	1,196	Valid
		2	0,648		Valid
		3	0,593		Valid
		4	0,675		Valid
		5	0,53		Valid
4	Kepercayaan Masyarakat (Y)	1	0,691	1,196	Valid
		2	0,706		Valid
		3	0,606		Valid
		4	0,605		Valid
		5	0,706		Valid

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh item memiliki nilai korelasi nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196). Sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan instrumen adalah valid dan data yang diperoleh layak digunakan dalam proses analisis data.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kestabilan antara hasil penelitian yang dilakukan dalam kuesioner, pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai Cronbach Alpha, jika nilai Cronbach Alpha $> 0,6$ maka kuesioner dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Akuntabilitas (X1)	0,693	Reliabel
2	Transparansi (X2)	0,635	Reliabel
3	Responsiviness (X3)	0,63	Reliabel
4	Kepercayaan Masyarakat (Y)	0,652	Reliabel

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel menunjukkan masing-masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai cronbach alpha $> 0,6$ sehingga dapat dinyatakan variabel pada penelitian ini dari waktu ke waktu terbukti reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Cara yang digunakan pada uji normalitas untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidaknya dengan menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov test. Jika hasil dari uji

kolmogorov-smirnov dengan hasil nilai asymp signifikansi (Sig) lebih besar > dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil dari uji kolmogorov-smirnov dengan hasil nilai asymp signifikansi (Sig) lebih kecil < dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 7 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,85186038
Most Extreme Differences	Absolute	,046
	Positive	,043
	Negative	-,046
Test Statistic		,046
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, dimana hasil menunjukkan bahwa data variabel residual (asymp. Sig) mempunyai nilai signifikan sebesar $0,200 > 0,05$, maka data yang ada berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bisa dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika hasil dari tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	7,028	1,620		4,337	,000		
Akuntabilitas	-,358	,102	-,372	-3,503	,001	,430	2,323
Transparansi	,234	,088	,257	2,644	,010	,514	1,946
Responsiveness	,790	,081	,789	9,713	,000	,736	1,359

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Pada tabel menunjukkan hasil dari uji Multikolonieritas pada masing-masing variabel. Nilai tolerance pada seluruh variabel $> 0,1$, begitu pula dengan nilai VIF seluruh variabelnya memiliki nilai < 10 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas, sehingga variabel tersebut layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, uji heteroskedastisitas

bisa dilihat melalui uji glejser, jika hasil dari sig > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas glejser dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 9 Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,882	,988		1,904	,060
	Akuntabilitas	,025	,062	,063	,407	,685
	Transparansi	,009	,054	,023	,166	,869
	Responsiveness	-,056	,050	-,134	-1,131	,261

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Pada tabel menunjukkan nilai Sig. dari masing-masing masing variabel hasil uji heteroskedastisitas lebih dari 0,05 maka pengujian model regresi dalam peneliian ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda :

Tabel 4. 10 Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,028	1,620		4,337	,000
	Akuntabilitas	-,358	,102	-,372	-3,503	,001
	Transparansi	,234	,088	,257	2,644	,010
	Responsiveness	,790	,081	,789	9,713	,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linear seperti berikut ini:

$$Y = 7,028 - 0,358X_1 + 0,234X_2 + 0,790X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang telah disajikan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 7,028 menunjukkan bahwa jika nilai Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsiveness sama dengan nol, maka tingkat kepercayaan masyarakat diperkirakan sebesar 7,028.
2. Koefisien Akuntabilitas (X_1) sebesar -0,358 berarti setiap peningkatan satu satuan pada Akuntabilitas akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,358, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien Transparansi (X_2) sebesar 0,234 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada Transparansi akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,234, dengan variabel lain tetap.

4. Koefisien Responsiviness (X_3) sebesar 0,790 mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan pada Responsiviness akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,790, dengan variabel lain dianggap konstan.

4.2.5 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R square (R^2) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh ke smampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Koefisiendeterminasi R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,730 ^a	,534	,519	1,881

a. Predictors: (Constant), Responsiveness, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Pada tabel diatas, maka diperoleh nilai koefisien determinasi atau r square sebesar 0.519 hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas dan transparansi untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat adalah sebesar 0.519 atau

51,9 % sisanya 48,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

b. Uji t (Parsial)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Uji t (Parsial)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,028	1,620		4,337	,000
	Akuntabilitas	-,358	,102	-,372	-3,503	,001
	Transparansi	,234	,088	,257	2,644	,010
	Responsiveness	,790	,081	,789	9,713	,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat
Sumber : data primer diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- 1) Nilai (sig) untuk variabel variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0,05,. Namun, koefisien regresi untuk Akuntabilitas bernilai negatif (-0,358), artinya secara parsial Akuntabilitas berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Hal ini

mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa cenderung menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

- 2) Nilai (sig) dari variabel transparansi (X2) sebesar 0,010 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0,05, dan koefisien regresinya positif sebesar 0,234. Dengan demikian, transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, yang berarti semakin tinggi transparansi, kepercayaan masyarakat juga meningkat.
- 3) Nilai (sig) dari variabel responsiveness (X3) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0,05, dan koefisien regresi positif sebesar 0,790. Hal ini mengindikasikan bahwa responsiveness memiliki pengaruh positif dan kuat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga peningkatan responsiveness akan meningkatkan kepercayaan masyarakat secara signifikan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar $0,001 < 0,05$ menunjukkan adanya hubungan yang kuat, namun arah

pengaruhnya negatif, ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -0,358. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa justru diikuti dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika akuntabilitas hanya formalitas dan laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan dan prosedur, apabila hasil nyata seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, atau program kesejahteraan tidak terlihat, masyarakat cenderung menilai bahwa akuntabilitas hanya sebatas formalitas di atas kertas. Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa proses akuntabilitas yang diterapkan belum sesuai dengan harapan masyarakat, misalnya terlalu formal atau hanya bersifat administratif.

Dalam konteks teori legitimasi, pemerintah desa memerlukan dukungan masyarakat untuk mempertahankan legitimasi atas kewenangan yang dimilikinya. Akuntabilitas seharusnya menjadi sarana untuk membuktikan bahwa pemerintah desa bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Namun, apabila proses akuntabilitas tidak dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan komunikatif, maka masyarakat bisa merasa tidak dilibatkan, sehingga kepercayaan justru menurun dijalankan (Azizah & Kholifah R, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa legitimasi tidak cukup dibangun hanya melalui pelaporan atau prosedur, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.

Hasil ini sejalan dengan temuan Arfiansyah (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas yang tidak disertai transparansi dan pelibatan publik dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas yang hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif tanpa adanya komunikasi terbuka dan pelibatan masyarakat secara aktif, cenderung dipersepsi negatif oleh publik. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki kendali atau akses terhadap informasi, sehingga memperlemah kepercayaan terhadap aparat desa. Temuan senada juga dikemukakan oleh Sofyani & Tahar (2021), yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh seberapa besar mereka merasa dilibatkan dan mendapat informasi secara jelas.

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Pratolo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, selama proses tersebut dilakukan secara menyeluruh, partisipatif, dan menyentuh aspek substansi, bukan hanya formalitas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Beshi & Kaur (2020) menambahkan bahwa masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih tinggi jika mereka merasa pemerintah desa terbuka dalam pengambilan keputusan dan mampu menunjukkan integritas dalam penggunaan dana publik

Dengan demikian, dalam kerangka legitimasi, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa akuntabilitas dilakukan tidak

hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, serta koefisien regresi sebesar 0,234. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat merasa tenang ketika mereka tahu berapa jumlah dana yang di terima desa dan bagaimana penggunaannya. Hal ini mengurangi kecurigaan terhadap aparat desa, sehingga kepercayaan tumbuh secara alami. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap keterbukaan informasi dan mengapresiasi akses terhadap proses serta hasil pengelolaan dana publik.

Dalam pandangan teori legitimasi, transparansi menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Legitimasi akan lebih mudah diperoleh ketika pemerintah desa bersedia membuka diri kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat, maka kepercayaan terhadap lembaga

pemerintahan desa akan meningkat (Malinda et al., 2024). Transparansi membantu mengurangi asimetri informasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Tahar (2021) dan Mansoor (2021) yang menyatakan bahwa transparansi dalam penyampaian informasi dapat memperkuat legitimasi pemerintah desa, sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik dikelola, sehingga muncul rasa percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian lain oleh Beshi & Kaur (2020) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin rendah potensi kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan temuan Angelia Aprilia (2019), yang menyatakan bahwa transparansi tidak selalu berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat apabila informasi yang disampaikan bersifat teknis, sulit diakses, atau tidak dipahami oleh warga secara luas. Dalam situasi tersebut, keterbukaan justru bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan kecurigaan, terutama jika masyarakat tidak dibekali dengan literasi yang memadai untuk

menafsirkan informasi keuangan. Senada dengan itu, Azizah & Kholifah R (2023) menambahkan bahwa transparansi harus didukung dengan media komunikasi yang efektif serta kesiapan perangkat desa dalam menjelaskan informasi secara terbuka dan berkelanjutan agar benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah desa perlu memastikan bahwa transparansi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga secara substansial, dengan memberikan informasi yang mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3.3 Pengaruh Responsivitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,790 menunjukkan bahwa semakin tinggi responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ketika muncul permasalahan seperti jalan yang mengalami kerusakan atau keterlambatan penyaluran bantuan, aparat yang tanggap dan segera mengambil tindakan memberikan kesan bahwa pengelola memiliki komitmen dalam melayani masyarakat. Respons cepat ini

menurunkan tingkat kekecewaan warga dan memperkuat keyakinan mereka terhadap keseriusan pengelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mendengarkan, memahami, dan merespons persoalan publik dengan cepat dan tepat.

Dalam kerangka teori legitimasi, responsivitas menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Pemerintah desa yang responsif dianggap memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik secara aktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa keluhan dan kebutuhan mereka didengar dan ditindaklanjuti, maka rasa percaya terhadap pemerintah desa akan tumbuh secara alami (Mochtar et al., 2022). Hal ini memperkuat posisi pemerintah sebagai pihak yang layak dipercaya dan diberi mandat dalam pengelolaan dana desa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hartanto et al. (2021) dan Hafid Risalbi et al. (2021), yang menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ketika pemerintah tanggap dan mampu memenuhi kebutuhan warganya secara cepat dan tepat, masyarakat cenderung merasa diperhatikan, sehingga memperkuat kepercayaan yang diberikan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Mansoor (2021), yang menekankan bahwa kecepatan

respons terhadap aduan atau permintaan masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah desa dianggap peduli dan bertanggung jawab terhadap warganya. Responsivitas yang tinggi mencerminkan adanya komunikasi dua arah yang sehat antara masyarakat dan aparat desa, yang pada akhirnya memperkuat hubungan timbal balik berbasis kepercayaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya tumbuh dari seberapa cepat pemerintah desa merespons, melainkan juga dari kualitas respons itu sendiri. Dalam hal ini, penelitian Arfiansyah (2021) menunjukkan bahwa responsivitas yang bersifat formal atau sekadar simbolik tidak cukup untuk membangun kepercayaan yang kuat. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata yang menyentuh persoalan substantif, bukan hanya janji atau tanggapan administratif. Selain itu, Sofyani & Tahar (2021) menyatakan bahwa bentuk tanggapan pemerintah desa yang menyeluruh, transparan, dan disertai tindak lanjut konkret akan lebih berdampak dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Oleh karena itu, responsivitas perlu dilihat sebagai bagian dari komitmen etis pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, responsivitas tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan hubungan antara pemerintah desa dan

masyarakat. Pemerintah desa perlu menjaga dan meningkatkan responsivitas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pengelolaan dana terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Ketika akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa belum dijalankan secara maksimal atau masih menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap aparat desa. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat merasa tidak dilibatkan atau informasi yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban yang transparan dan adil.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Ketika pemerintah desa terbuka dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait penggunaan dana dan pengambilan keputusan, maka masyarakat akan merasa lebih dihargai dan dilibatkan. Keterbukaan ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena merasa adanya kejelasan dan tidak ada hal yang ditutupi.
3. Responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Ketika pemerintah desa tanggap

terhadap kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat, maka hal tersebut akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Responsivitas yang baik mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melayani dan memperhatikan warganya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktisi

Bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan di Desa Bojong Kulon diharapkan untuk terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan dan pendampingan dapat diberikan kepada aparat desa agar mampu menjalankan akuntabilitas yang lebih efektif dan melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, pemerintah desa juga perlu membuka akses informasi secara luas agar masyarakat mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga.

5.2.2 Saran Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar tidak hanya fokus pada variabel akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas saja. Penelitian dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, seperti partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa, budaya lokal, atau tingkat

pendidikan masyarakat. Selain itu, disarankan pula untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dengan melibatkan beberapa desa agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasi. Penambahan jumlah sampel yang lebih besar juga akan membantu memperoleh hasil yang lebih akurat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan ...*, 2(1), 49–68. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/70%0Ahttps://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/download/70/31>
- Arwati, D., & Verdania Latif, D. (2021). E Government And Public Satisfaction Of Bandung City Government Accountability. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 501–504.
- Azizah, D. N., & Kholifah R, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.117>
- Bani Pamungkas. (2023). Smart-Legislation for Meaningful Participation in Urban Policymaking: An Overview Post-Issuance of Act Number 13 of 2022”. *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues*, 1(1), 25–42.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining

- the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 93–105. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135>
- Hartanto, D., Agussani, A., & Dalle, J. (2021). Antecedents of public trust in government during the COVID-19 pandemic in Indonesia: Mediation of perceived religious values. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4), 321–341. <https://doi.org/10.29333/EJECS/975>
- Ikhsan, I., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2413–2424. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5904>
- Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is It Erradicating Poverty? *Policy & Governance Review*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.169>
- Karneji Sumarlin Bucika Sormin. (2024). Analisis Pengaruh Transparansi dan

- Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3962–3973.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>
- Malinda, O., Lampang, M. A., Abshar, M., & Ramadhan, N. (2024). *E-Profit Mengungkap Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengelolaan PAD dan APBD di Kalimantan Tengah E-Profit*. 6(2), 209–219.
- Mansoor, M. (2021). Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect , the company ’ s public news and information. *Government Information Quarterly*, 38(January), 1–14.
- Mochtar, D., Hadi, D., & Ab, S. A. (2022). Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Polres Rejang Lebong Terhadap Pengaduan Masyarakat). *Student Journal of Business and Management*, 4(2), 218–239.
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143.
<https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>

- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi*.
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). *Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 5(3), 1480–1486.
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R. W. (2022). The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>
- Prihatin, M., & Mustaqim, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 5, 18–36. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3590%0Ahttp://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/3590/1847>
- Ramadhani, A., & Amin, M. N. (2023). Pengaruh Green Intellectual Capital Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 531–542. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15582>
- Restufiani, A. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa: Studi kasus pada pemerintah Desa Wonosari Kabupaten Malang. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi

- Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Syafrida Hafni Sahir. (2022). “Metodologi Penelitian”. Penerbit KBM Indonesia.
- Widaningrum, V. D., & Fahriani, F. Z. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2425–2435. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5899>
- WidyaLestari, Y. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Wangandawa Kec. Talang Kab. Tegal). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*, 2013–2015. <http://repository.upstegal.ac.id/4119/>
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens’ trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, *Responsiviness* Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Moh Abdul Azis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon Program Studi Akuntansi yang akan melakukan penelitian yang merupakan bagian dari tugas akhir skripsi dan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, Responsiviness Pengelolaan Dana berdampak pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Jika Anda merupakan warga Desa Bojong Kulon, saya mohon kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan sederhana terkait pendapat Anda mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana di desa.

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Baca setiap pertanyaan dengan saksama sebelum memberikan tanggapan.
2. Berikan tanda centang (✓) pada opsi yang tersedia, Anda dapat memilih jawaban yang paling sesuai dengan pendapat atau pengalaman Anda.
3. Untuk pertanyaan dengan skala penilaian (Likert), pilih salah satu angka dari 1 hingga 5, dengan ketentuan berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju,

2 = Tidak Setuju,

3 = Netral,

4 = Setuju, dan

5 = Sangat Setuju.

4. Untuk pertanyaan terbuka, berikan jawaban yang singkat, jelas, dan relevan dengan pendapat Anda.
5. Data yang diberikan akan disimpan rahasia dan hanya akan digunakan untuk penelitian ini.

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir ☐ SD
☐ SMP
☐ SMA/SMK
☐ D3/S1/S2/S3

Berapa Tahun Bapak/Ibu :

Tinggal di Desa Bojong

Kulon?

No	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS

		1	2	3	4	5
Akuntabilitas						
1.	Pengelola dana desa memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala.					
2.	Laporan penggunaan dana mudah diakses oleh masyarakat					
3.	Dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati					
4.	Pengelola dana desa bertindak profesional dan bertanggung jawab.					
5.	Masyarakat diberi kesempatan untuk menilai kinerja pengelola dana.					
Transparansi						
6.	Informasi mengenai dana desa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.					
7.	Masyarakat mengetahui jumlah dan alokasi dana desa setiap tahun					
8.	Mekanisme penyaluran dana desa dijelaskan secara jelas dan rinci.					
9.	Informasi tentang penggunaan dana mudah dipahami oleh masyarakat awam..					
10.	Tidak ada indikasi menyembunyian informasi oleh					

	pengelola dana desa.					
Responsiveness						
11.	Pengelola dana desa cepat tanggap terhadap kebutuhan					
12.	Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana desa.					
13.	Keluhan masyarakat terkait dana desa segera ditindaklanjuti.					
14.	Program yang dibiayai dana desa mencerminkan kebutuhan warga.					
15.	Aspirasi warga selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.					
Kepercayaan Masyarakat						
16.	Saya percaya bahwa dana desa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.					
17.	Saya merasa pengelola dana desa bekerja dengan jujur dan adil.					
18.	Saya mendukung pengelolaan dana desa oleh pihak yang saat ini menjabat.					
19.	Saya percaya bahwa ada pengawasan yang baik terhadap dana desa.					
20.	Saya yakin dana desa dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi.					

Terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah diluangkan untuk mengisi kuesioner ini. Setiap jawaban yang diberikan sangat berarti dan akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran serta kebermanfaatan penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pengelolaan dana desa di masa mendatang.

Lampiran 2

Tabulasi Data Hasil Kuesioner

No.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	ΣX_1	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	ΣX_2
1	4	4	3	3	5	19	3	2	4	4	5	18
2	4	5	4	4	4	21	4	2	4	4	4	18
3	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	18
4	3	4	3	4	5	19	4	4	5	4	4	21
5	3	4	5	5	5	22	5	1	5	5	5	21
6	4	4	4	5	4	21	5	4	5	4	4	22
7	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	20
8	5	5	4	4	5	23	4	4	4	3	4	19
9	4	4	3	5	3	19	5	2	5	5	3	20
10	2	3	3	2	3	13	2	2	3	3	2	12
11	5	5	5	4	4	23	4	5	2	5	5	21
12	1	5	5	2	3	16	2	4	5	3	3	17
13	3	4	4	4	4	19	4	4	5	5	5	23
14	3	4	4	4	4	19	4	4	4	5	5	22
15	5	4	4	4	5	22	4	5	4	4	4	21
16	5	5	4	5	5	24	5	4	4	5	5	23
17	4	4	4	5	5	22	5	4	5	4	4	22
18	4	4	4	5	4	21	5	4	5	4	3	21
19	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	4	20
20	3	3	4	5	3	18	5	3	5	4	3	20
21	3	4	3	4	4	18	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	3	3	18	3	4	4	4	4	19
23	2	5	4	2	2	15	2	1	2	4	5	14
24	3	5	5	4	4	21	4	3	4	3	3	17
25	3	4	5	5	5	22	5	3	3	3	3	17
26	4	4	4	4	4	20	4	5	4	5	4	22
27	4	3	4	4	3	18	4	3	4	4	4	19
28	4	4	4	5	4	21	5	4	5	5	5	24
29	3	5	4	5	3	20	5	2	3	4	4	18
30	3	3	3	3	5	17	3	4	4	4	4	19
31	3	4	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19
32	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	5	21
33	4	4	4	5	4	21	5	4	5	5	4	23
34	3	4	4	5	5	21	5	2	5	5	4	21
35	3	4	5	3	4	19	3	2	4	4	4	17
36	3	3	3	5	5	19	5	3	4	5	4	21
37	5	5	5	5	4	24	5	4	5	5	4	23

38	4	4	3	4	5	20	4	3	4	5	3	19
39	3	4	4	5	4	20	5	3	3	3	4	18
40	4	4	4	4	4	20	4	3	2	2	3	14
41	4	4	4	5	5	22	5	5	3	4	5	22
42	3	5	5	5	4	22	5	5	5	4	4	23
43	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
44	5	5	5	5	4	24	5	3	5	5	5	23
45	4	4	3	5	5	21	5	4	4	4	3	20
46	4	4	4	5	5	22	5	4	5	4	3	21
47	4	5	4	5	3	21	5	4	4	5	5	23
48	3	4	4	5	4	20	5	4	2	2	3	16
49	4	4	4	5	5	22	5	2	4	4	4	19
50	4	4	4	5	5	22	5	3	5	5	3	21
51	5	5	5	5	5	25	5	5	2	4	4	20
52	4	4	4	5	4	21	5	4	5	5	4	23
53	4	4	3	4	4	19	4	4	5	5	3	21
54	3	4	4	5	5	21	5	3	4	4	3	19
55	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	23
56	4	4	3	5	5	21	5	2	5	5	4	21
57	1	4	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20
58	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	4	22
59	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
60	3	4	4	4	4	19	4	3	4	3	3	17
61	5	4	4	4	4	21	4	3	4	5	4	20
62	4	5	4	5	5	23	5	4	4	5	4	22
63	5	5	5	3	3	21	3	5	3	2	4	17
64	5	5	5	5	4	24	5	3	5	4	4	21
65	2	3	4	4	4	17	4	2	3	4	3	16
66	5	5	5	4	4	23	4	4	4	3	4	19
67	5	4	4	4	4	21	4	5	4	5	4	22
68	3	4	2	3	2	14	3	3	3	3	3	15
69	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24
70	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
71	4	3	3	5	4	19	5	5	3	5	4	22
72	3	4	3	2	5	17	2	2	3	2	4	13
73	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	4	20
74	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
75	3	3	3	4	4	17	4	3	3	3	5	18
76	4	4	3	1	2	14	1	2	1	3	4	11
77	4	4	3	2	3	16	2	4	2	3	4	15
78	3	4	4	5	5	21	5	4	4	4	4	21
79	4	5	4	5	5	23	5	5	5	4	3	22

80	4	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	15
81	2	4	5	5	4	20	5	4	4	4	4	21
82	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	19
83	3	3	4	2	4	16	2	2	1	3	4	12
84	3	4	2	4	4	17	4	2	2	3	5	16
85	3	3	3	2	4	15	2	2	1	3	5	13
86	3	3	3	4	4	17	4	2	2	3	5	16
87	4	3	3	4	3	17	4	4	2	5	5	20
88	3	4	3	4	4	18	4	4	2	5	5	20
89	3	5	4	4	4	20	4	4	2	4	5	19
90	2	3	3	4	4	16	4	4	4	4	5	21
91	4	5	3	4	3	19	4	2	2	4	5	17
92	4	5	3	5	4	21	5	5	4	4	5	23
93	3	4	3	4	3	17	4	4	3	4	5	20
94	3	4	3	4	4	18	4	4	2	4	5	19
95	5	3	3	3	4	18	3	3	2	4	5	17
96	3	4	3	3	3	16	3	3	3	4	4	17
97	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	4	20
98	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	4	20
99	2	2	5	2	3	14	2	5	3	2	3	15
100	1	2	3	3	5	14	3	2	4	2	4	15

No.	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	ΣX^3	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	ΣY
1	5	5	4	4	4	22	5	4	5	3	4	21
2	4	4	5	4	5	22	2	5	4	4	5	20
3	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
4	1	3	4	3	4	15	2	4	5	2	4	17
5	3	4	4	3	4	18	2	4	4	5	4	19
6	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	5	21	4	5	4	4	5	22
8	2	2	5	5	3	17	3	3	4	4	3	17
9	2	4	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20
10	2	3	3	2	4	14	3	4	3	3	4	17
11	2	5	5	5	4	21	3	4	5	2	4	18
12	3	4	5	1	3	16	4	3	5	5	3	20
13	5	5	4	3	4	21	3	4	4	5	4	20
14	4	4	4	3	5	20	3	5	4	3	5	20
15	3	2	4	5	4	18	2	4	4	3	4	17
16	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
17	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
18	3	4	4	4	4	19	2	4	3	2	4	15

19	5	4	3	4	4	20	4	4	5	4	4	21
20	3	3	3	3	4	16	5	4	4	4	4	21
21	4	4	4	3	5	20	3	5	5	2	5	20
22	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
23	5	5	5	2	4	21	4	4	5	3	4	20
24	3	3	5	3	5	19	4	5	4	5	5	23
25	4	3	4	3	3	17	2	3	3	3	3	14
26	3	4	4	4	5	20	4	5	4	5	5	23
27	5	5	3	4	5	22	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19
29	4	5	5	3	4	21	3	4	3	5	4	19
30	3	5	3	3	4	18	2	4	5	5	4	20
31	3	4	4	3	3	17	3	3	4	4	3	17
32	5	5	5	5	5	25	3	5	5	4	5	22
33	3	4	4	4	5	20	5	5	5	3	5	23
34	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	3	5	20	5	5	4	4	5	23
36	5	5	3	3	4	20	5	4	5	3	4	21
37	3	4	5	5	5	22	5	5	4	4	5	23
38	4	5	4	4	4	21	4	4	4	3	4	19
39	3	4	4	3	4	18	3	4	2	2	4	15
40	2	4	4	4	3	17	2	3	5	5	3	18
41	5	5	4	4	4	22	4	4	5	5	4	22
42	5	3	5	3	5	21	4	5	5	5	5	24
43	5	4	5	5	4	23	4	4	5	5	4	22
44	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	5	23
45	4	2	4	4	4	18	3	4	4	3	4	18
46	3	4	4	4	4	19	3	4	4	4	4	19
47	5	4	5	4	5	23	5	5	5	5	5	25
48	4	3	4	3	5	19	4	5	4	3	5	21
49	5	3	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19
50	4	3	4	4	4	19	4	4	5	5	4	22
51	3	3	5	5	5	21	2	5	5	1	5	18
52	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	4	22
53	3	4	4	4	4	19	3	4	2	5	4	18
54	3	5	4	3	3	18	4	3	4	3	3	17
55	5	5	4	4	5	23	3	5	5	1	5	19
56	2	2	4	4	4	16	3	4	2	3	4	16
57	1	4	4	1	4	14	2	4	4	4	4	18
58	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	4	19
60	2	3	4	3	5	17	2	5	3	4	5	19

61	4	4	4	5	3	20	2	3	5	3	3	16
62	4	3	5	4	4	20	3	4	5	3	4	19
63	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
64	5	4	5	5	5	24	4	5	4	5	5	23
65	4	2	3	2	3	14	4	3	4	2	3	16
66	5	5	5	5	4	24	4	4	5	3	4	20
67	4	4	4	5	4	21	4	4	5	3	4	20
68	3	4	4	3	4	18	4	4	5	5	4	22
69	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
70	2	2	4	4	5	17	5	5	4	3	5	22
71	4	3	3	4	4	18	4	4	5	3	4	20
72	4	4	4	3	3	18	2	3	4	4	3	16
73	4	3	3	3	4	17	3	4	4	4	4	19
74	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
75	3	3	3	3	3	15	3	3	4	3	3	16
76	5	5	4	4	4	22	3	4	5	5	4	21
77	5	5	4	4	4	22	4	4	5	4	4	21
78	4	4	4	3	4	19	5	4	5	5	4	23
79	4	3	5	4	5	21	3	5	5	3	5	21
80	3	3	3	4	3	16	2	3	4	4	3	16
81	2	3	4	2	3	14	2	3	2	2	3	12
82	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
83	5	4	3	3	5	20	2	5	5	4	5	21
84	5	5	4	3	5	22	3	5	5	4	5	22
85	5	5	3	3	4	20	4	4	5	4	4	21
86	4	4	3	3	4	18	2	4	5	4	4	19
87	4	5	3	4	4	20	5	4	4	4	4	21
88	4	5	4	3	5	21	5	5	5	4	5	24
89	4	5	5	3	4	21	5	4	5	4	4	22
90	5	4	3	2	5	19	4	5	5	5	5	24
91	5	5	5	4	4	23	5	4	5	4	4	22
92	4	5	5	4	4	22	5	4	5	4	4	22
93	4	5	4	3	4	20	5	4	5	4	4	22
94	4	4	4	3	5	20	3	5	5	3	5	21
95	5	5	3	5	4	22	4	4	4	5	4	21
96	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	4	20
97	4	4	3	3	4	18	4	4	4	3	4	19
98	4	4	3	3	3	17	3	3	4	3	3	16
99	3	4	2	2	3	14	4	3	2	2	3	14
100	3	2	2	1	5	13	3	5	3	2	5	18

Lampiran 3 Hasil Olah Data SPSS

Uji Validitas

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Akuntabilitas
X1.1	Pearson Correlation	1	,452**	,259**	,325**	,213*	,694**
	Sig. (2-tailed)		,000	,009	,001	,034	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,452**	1	,508**	,314**	,105	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,297	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,259**	,508**	1	,284**	,187	,642**
	Sig. (2-tailed)	,009	,000		,004	,062	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,325**	,314**	,284**	1	,491**	,741**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,004		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,213*	,105	,187	,491**	1	,588**
	Sig. (2-tailed)	,034	,297	,062	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Akuntabilitas	Pearson Correlation	,694**	,687**	,642**	,741**	,588**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Transparansi
X2.1	Pearson Correlation	1	,294**	,525**	,517**	,047	,770**
	Sig. (2-tailed)		,003	,000	,000	,642	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,294**	1	,232*	,200*	,086	,598**
	Sig. (2-tailed)	,003		,020	,046	,392	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,525**	,232*	1	,462**	-,166	,703**
	Sig. (2-tailed)	,000	,020		,000	,100	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,517**	,200*	,462**	1	,313**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,046	,000		,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,047	,086	-,166	,313**	1	,317**
	Sig. (2-tailed)	,642	,392	,100	,001		,001
	N	100	100	100	100	100	100
Transparansi	Pearson Correlation	,770**	,598**	,703**	,761**	,317**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Responsiveness
X3.1	Pearson Correlation	1	,491**	,104	,263**	,282**	,717**
	Sig. (2-tailed)		,000	,301	,008	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,491**	1	,190	,173	,130	,648**
	Sig. (2-tailed)	,000		,058	,086	,198	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,104	,190	1	,452**	,265**	,593**
	Sig. (2-tailed)	,301	,058		,000	,008	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,263**	,173	,452**	1	,203*	,675**
	Sig. (2-tailed)	,008	,086	,000		,043	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,282**	,130	,265**	,203*	1	,530**
	Sig. (2-tailed)	,005	,198	,008	,043		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Responsiveness	Pearson Correlation	,717**	,648**	,593**	,675**	,530**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kepercayaan Masyarakat
Y1	Pearson Correlation	1	,283**	,271**	,282**	,283**	,691**
	Sig. (2-tailed)		,004	,006	,005	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,283**	1	,251*	,124	1,000**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,004		,012	,218	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,271**	,251*	1	,236*	,251*	,606**
	Sig. (2-tailed)	,006	,012		,018	,012	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,282**	,124	,236*	1	,124	,605**
	Sig. (2-tailed)	,005	,218	,018		,218	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,283**	1,000**	,251*	,124	1	,706**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,012	,218		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepercayaan Masyarakat	Pearson Correlation	,691**	,706**	,606**	,605**	,706**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Realibilitas

X1 Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,693	5

X2 Transparansi**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,635	5

X3 Responsiviness**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,630	5

Y Kepercayaan Masyarakat**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,652	5